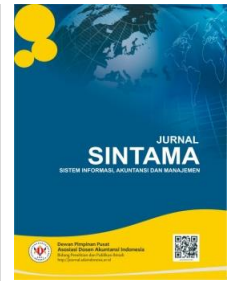




## SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

journal homepage:  
<https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>

E-ISSN 2808-9197



### Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan

Putri Kemala Dewi Lubis<sup>1\*</sup>, Lily Handayani<sup>2</sup>, Nurika Fahqna Hidayah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Penulis Korespondensi. Putri Kemaal Dewi Lubis

<sup>2</sup> Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan

e-mail: putrikemala@unimed.ac.id<sup>1</sup>

e-mail: putrikemala@unimed.ac.id<sup>1</sup>

#### ARTIKEL INFO

*Artikel History:*

Menerima 12 Desember

Revisi 20 Desember 2022

Diterima 26 Desember

Tersedia Online 29 Januari 2023

**Kata kunci :**

APBD, Kinerja keuangan

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja APBD kota Medan periode 2016 – 2020 dilihat dari varians belanja, pertumbuhan Belanja, keserasian belanja, efisiensi belanja dan belanja daerah terhadap PDRB. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus karena penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan kasus, mendeskripsikan dan kemudian menginterpretasikannya dengan memanfaatkan data yang berdasarkan pada angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran pemerintah Kota Medan secara umum dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari (a) Varians Belanja dengan rata – rata 78%, (b) Pertumbuhan Belanja dengan rata – rata 2%, (c) Belanja Per fungsi terealisasi 92,69%, Belanja Operasi dengan rata - rata 39%, Belanja Modal dengan rata - rata 27%, Belanja Langsung dengan rata – rata 81% dan Belanja Tidak langsung dengan rata rata 49%, Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata – rata dibawah 100% yaitu 78%, dan Belanja Terhadap PDRB dengan rata rata 3%.

#### ARTICLE INFO

*Artikel History:*

Recived 12 December 2022

Revision 20 December 2022

Accepted 26 December 2022

Availilable Online 29 January 2023

**Keywords :**

APBD, Financial performance

#### ABSTRACT

This study aims to evaluate the performance of the Medan city budget for the 2016-2020 period in terms of spending variance, shopping growth, shopping harmony, shopping efficiency and regional spending to GRDP. This research uses descriptive research with a case study approach because this research seeks to reveal cases, describe and then interpret them by utilizing data based on numbers. The results showed that the budget performance of the Medan City government was generally said to be good. This can be seen from (a) Shopping Variance with an average of 78%, (b) Shopping Growth with an average of 2%, (c) Expenditure Per function realized 92.69%, Operating Expenditure with an average of 39%, Capital Expenditure with an average of 27%, Direct Expenditure with an average of 81% and Indirect Expenditure with an average of 49%, Regional Expenditure Efficiency showing an average of below 100% which is 78%, and Expenditure on GRDP with an average of 3%.

© 2023 SIMTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

## 1. PENDAHULUAN

Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program (Halim *et al.*, 2021). Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Mahmudi (2010:142) Analisis Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah Kota Medan daerah telah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis, efisien dan efektif. Analisis Varians Belanja memberikan informasi perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis Pertumbuhan Belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis keserasian belanja akan memberikan informasi tentang keseimbangan antar belanja. Rasio Efisiensi Belanja memberikan informasi perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja sedangkan Rasio Belanja 3 Daerah terhadap PDRB akan menunjukkan produktivitas dan efisiensi belanja daerah. Berikut ini disajikan mengenai Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Medan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Medan**

Tahun	Anggara Belanja (Milyar Rupiah)			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase (%)
2016	5.380,36	4.525,23	855,13	84%
2017	5.493,56	4.395,83	1.097,73	80%
2018	5.451,09	4.215,00	1.236,09	77%
2019	6.134,66	5.060,73	1.073,93	82%
2020	6.188,22	3.993,25	2.194,97	65%

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja pada Pemerintah Kota Medan. Pada tahun 2016 anggaran belanja Pemerintah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp.5.380,36 dengan terealisasi sebesar Rp.4.525,23 terdapat selisih kurang sebesar Rp.855,13 dengan persentase sebesar 84%. Pada tahun 2017 anggaran belanja pada Pemerintah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp.5.493,56 dengan terealisasi sebesar Rp.4.395,83 terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp 1.097,73 dengan persentase 80%. Kemudian pada tahun 2018 anggaran belanja Pemerintah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp.5.451,09 dengan terealisasi belanja sebesar Rp. 4.215,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.236,09 dengan persentase

77%. Pada tahun 2019 anggaran belanja Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 6.134,66 dengan terealisasi sebesar Rp. 5.060,73 terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.073,93 dengan persentase 82%. Pada tahun 2020 anggaran belanja sebesar Rp. 6.188,22 dengan terealisasi sebesar Rp. 3.993,25 terdapat selisih kurang sebesar Rp. 2.194,97 dengan persentase 65%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja Pemerintah Kota Medan yang ditetapkan tidak terealisasi secara menyeluruh karena realisasi yang dicapai lebih kecil dari yang dianggarkan. Dari data anggaran belanja Pemerintah Kota Medan dapat dilihat apakah anggaran dan realisasi belanja menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan kinerja yang telah dicapai. Analisis Belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi Pemerintah Kota Medan telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Akuntansi Sektor Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya (Asip *et al.*, 2022). Dari sudut ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

### 2. Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisien dan efektivitas (Purboyo *et al.*, 2021), transparan, dan akuntabel. Siklus Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan atau implementasi, pelaporan dan evaluasi kinerja keuangan daerah (Mahmudi, 2010:15)

### 3. Belanja Daerah

Belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa belanja atau bisa juga merupakan pengeluaran pembiayaan. Kedua jenis pengeluaran ini baik belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan sama-sama membutuhkan bukti pengeluaran kas. Perbedaannya adalah untuk pengeluaran pembiayaan membutuhkan bukti pendukung berupa bukti memorial dan perlu persetujuan DPRB (Mahmudi, 2010:156)

### 4. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Hartini, Sudirman and Wardhana,

2021) . Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim, 2002:126). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut (Halim, 2002:128). Yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus karena penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan kasus, mendeskripsikan dan kemudian menginterpretasikannya dengan memanfaatkan data yang berdasarkan pada angka. Teknik Analisis Data Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menghitung rasio Efektifitas berdasarkan APBD
2. Menghitung rasio Efisiensi berdasarkan APBD
3. Menghitung rasio Belanja terhadap PDRB
4. Menghitung rasio Pertumbuhan Belanja

### **4. PEMBAHASAN**

#### **1. Analisis Rasio Efektivitas berdasarkan APBD**

Raiso efektivitas belanja daerah terhadap PDRB Pemerintah Kota Medan pada tahun 2016 sebesar 3%. Pada tahun 2017 sebesar 3%. Pada tahun 2018 sebesar 3%. Pada tahun 2019 sebesar 3%. Pada tahun 2020 sebesar 3%. Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan apa yang telah ditargetkan (Mahmudi, 2010). Semakin efektif suatu daerah maka daerah tersebut akan menggunakan biaya yang tepat dalam mencapai pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan meningkat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga ikut meningkat. Selain itu, semakin efektif suatu daerah akan melambangkan kegiatan investasi daerah yang optimal, sehingga fasilitas dan pelayanan publik semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Merton, 1992).

#### **2. Analisis Rasio Efisiensi Belanja berdasarkan APBD**

Rasio efisiensi pada tahun Anggaran 2016 menunjukkan sebesar 84%, pada tahun Anggaran 2017 menurun menjadi 80% dan pada tahun Anggaran 2018 menurun menjadi 77% sedangkan Pada tahun Anggaran 2019 kembali naik menjadi 82%. Dan kemudian pada tahun anggaran 2020 menurun menjadi 65%. Jika dibandingkan dengan Rasio efisiensi belanja tahun Anggaran 2016 maka rasio efisiensi Belanja Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 9,17% artinya pada tahun 2016 belanja Pemerintah Kota Medan relatif lebih efisien. Peningkatan Rasio Efisiensi Belanja ini disebabkan total realisasi Belanja

Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2020.

Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Medan berada pada predikat kurang dari 100%. Masuk kedalam kategori efisien dalam penggunaan anggaran belanja daerah yang dimiliki sehingga tercapai penghematan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengelolaan anggaran belanja Pemerintah Kota Medan. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, rata rata rasio efisiensi belanja daerah Pemerintah Kota Medan sudah mampu meminimalkan penggunaan sumber daya (anggaran belanja daerah) yang ada tetapi belum maksimal dalam penggunaan sumber anggaran yang dimiliki.

### **3. Analisis Rasio Belanja Terhadap PDRB**

Rasio belanja daerah terhadap PDRB cenderung stabil. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 persentase rasio belanja terhadap PDRB adalah sama. Rata - rata rasio belanja daerah terhadap PDRB Pemerintah Kota Medan sebesar 3% yaitu stabil. Hal ini dikatakan bahwa rasio belanja terhadap PDRB tiap tahun berdampak pada pengeluaran belanja pemerinthan. Karena menurunnya PDRB maka pendapatan akan menurun dan alokasi untuk belanja daerah juga menurun.

### **4. Analisis Pertumbuhan Belanja**

Tingkat pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Medan pada tahun anggaran 2016 mengalami peningkatan dan penurunan dalam persentasinya. Pertumbuhan Belanja 2016 sebesar 19% bersaldo positif, Pertumbuhan 2017 sebesar -3% bersaldo negatif. Pertumbuhan 2018 sebesar -4% negatif, Pertumbuhan 2019 meningkat sebesar 20% positif, Pertumbuhan 2020 menurun sebesar -21% namun tetap baik karena berdaldo negative. Persentasi setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan, dikatakan bahwa pertumbuhan belanja tidak stabil. Pada tahun 2019 peningkatan paling besar sebesar 20%, rasio tersebut berada pada pertumbuhan yang sangat baik dibandingkan tahun 2016, 2017, 2018, 2020. Pertumbuhan belanja tahun 2016 sampai dengan 2020 meningkat terkecuali di tahun 2017, 2018 dan 2020. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Medan tidak merealisasikan belanja Modal dengan baik dan mengurangi porsi belanja yang dialokasikan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah seperti pembangunan dalam bidang infrastruktur dan ekonomi serta sumber daya manusia dan bantuan pendidikan, yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan. Persentase peningkatan tiap tahun naik turun, hal ini menandakan bahwa kualitas output kegiatan pada tahun 2016 hingga 2020 belum terlaksana dengan maksimal

## **5. PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis Varians Belanja Pemerintah Kota Medan dikatakan efisien dan efektif karena pada realisasi belanja tidak melebihi anggaran.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Medan pada tahun 2016 sampai 2020 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Menunjukkan bahwa kinerja dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan tiap tahunnya.
3. Analisis Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Medan pada tahun 2016 sampai 2020 dikatakan mampu melakukan penghematan anggaran belanja dengan baik dan efisiensi kurang dari 100%, hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase mencapai 78% dengan kriteria serasi.

## SARAN

Adapun Saran yang dapat berikan kepada pihak instansi khususnya Pemerintah Kota Medan sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan rasio efisiensi belanjanya di masa yang akan datang dalam penggunaan anggaran belanja daerah yang dimiliki dan memaksimalkan penggunaan sumber anggaran yang dimiliki.
2. Memperhatikan pertumbuhan belanjanya dengan menyeimbangkan dengan laju pertumbuhan pendapatan agar meningkat dimasa yang akan datang.
3. Mengelola anggaran belanja operasi dan modal yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan adanya kinerja yang baik dalam mengelola anggaran maka akan terjadi produktifitas dan efisiensi belanja yang lebih baik.
4. Memprioritaskan untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan dan seimbang belanja untuk pembangunan daerah antara belanja untuk pemerintahan (Belanja Tak Langsung) dan belanja untuk pembangunan (Belanja Langsung)
5. Memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*, Bapekki Depkeu.
- Amins, Achmad. 2012. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Laksbang Press Indo. Yogyakarta
- Ariefiansyah, Ryan dan Miyosi Margi Utami. 2012. *Membuat Lapora Keuangan Gampong*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Asip, M. *et al.* (2022) *Komunikasi Bisnis*. Bandung: Media Sains Indonesia. Available at: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Dadang Suwanda dan Hendri Santosa. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada SAP*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Dina, Aryanto. 2012. *Penganggaran Sektor Publik, Modul*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Halim, F. *et al.* (2021) 'Reflections on The Interest in Buying Smartphone Products Among Millennials: Consumer Satisfaction As The Mediating Effect', *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 8(1), pp. 49–68. doi: 10.24252/minds.v8i1.20402.
- Halim, Abdul., 2002. "Akuntansi Keuangan Daerah". Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hartini, H., Sudirman, A. and Wardhana, A. (2021) *MSDM (Digitalisasi Human Resources)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Mahsun, Mohammad, 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI
- Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Purboyo, P. *et al.* (2021) *Perilaku Konsumen (Tinjauan Konseptual dan Praktis)*. Bandung: Media Sains Indonesia.